



# **PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

## **Tahun 2019**

<https://sulut.bps.go.id>





**PROFIL KETENAGAKERJAAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Tahun 2019**

# **PROFIL KETENAGAKERJAAN**

## **PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019**

**ISBN: 978 – 602 - ) \* +' !' , !&**

**Nomor Publikasi: 71520.200(**

**Katalog BPS: 2303003.71**

**Ukuran Buku: A4 (21 cm x 29,7 cm)**

**Jumlah Halaman: x + 30 halaman**

### **Naskah**

Bidang Statistik Sosial

BPS Provinsi Sulawesi Utara

### **Penyunting**

Bidang Statistik Sosial

BPS Provinsi Sulawesi Utara

### **Gambar Kulit**

Bidang Statistik Sosial

BPS Provinsi Sulawesi Utara

### **Diterbitkan Oleh**

CV. Bahu Bahtera Indah

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik.**

# KATA PENGANTAR

Publikasi “Profil Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019” merupakan salah satu referensi di bidang ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara. Publikasi ini memuat berbagai tabel dan grafik serta analisis singkat yang menggambarkan situasi ketenagakerjaan tahun 2019 di Bumi Nyiur Melambai berdasarkan Data Sakernas Agustus Tahun 2019. Tabel dan grafik yang ditampilkan dalam publikasi ini dirinci menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini. Kritik dan saran dari para pengguna sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi edisi berikutnya.

Manado, Mei 2020

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Utara



**Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si**

- Halaman ini sengaja dikosongkan -

<https://sulut.bps.go.id>

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Konsep dan Definisi .....	1
BAB 2 Profil Ketenagakerjaan .....	9
2.1 Profil Penduduk Usia Kerja: Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja .....	9
2.2 Partisipasi Angkatan Kerja.....	12
2.3 Profil Penduduk yang Bekerja.....	16
2.4 Profil Pengangguran.....	24
2.5 Profil Setengah Pengangguran .....	27

- Halaman ini sengaja dikosongkan -

<https://sulut.bps.go.id>

# DAFTAR TABEL & GAMBAR

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Situasi Tenaga Kerja di Sulawesi Utara Agustus 2018 dan Agustus 2019.....	9

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Penduduk Usia Kerja.....	2
Gambar 2.1 Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019.....	10
Gambar 2.2 Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019.....	12
Gambar 2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2018-2019.....	13
Gambar 2.4 Persentase Angkatan Kerja Menurut Kegiatan Utama dan Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019.....	14
Gambar 2.5 Rasio Pekerja dan Angka Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019.....	15

Gambar 2.6	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019 .....	16
Gambar 2.7	Tingkat Pekerja Miskin Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019 .....	17
Gambar 2.8	Persentase Pekerja Menurut Sektor, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019 .....	18
Gambar 2.9	Persentase Pekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2018-2019.....	19
Gambar 2.10	Persentase Pekerja Menurut Status Pekerjaan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019.....	20
Gambar 2.11	Persentase Pekerja Formal dan Informal di Provinsi Sulawesi Utara Agustus 2018- 2019.....	21
Gambar 2.12	Persentase Pekerja Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019.....	22
Gambar 2.13	Persentase Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019 .....	23
Gambar 2.14	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019 .....	25
Gambar 2.15	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (%) di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2018-2019.....	26
Gambar 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka & Tingkat Setengah Pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2018-2019	28
Gambar 2.17	Proporsi Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (%) di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2018-2019	28
Gambar 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019.....	30

- Halaman ini sengaja dikosongkan -

<https://sulut.bps.go.id>

- Halaman ini sengaja dikosongkan -

<https://sulut.bps.go.id>

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penduduk merupakan sumber penawaran tenaga kerja suatu wilayah. Penduduk yang sehat dan berpendidikan merupakan modal untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Menilik dari jumlah penduduk usia kerja saat ini, Provinsi Sulawesi Utara sedang menikmati bonus demografi, yaitu menurunnya angka ketergantungan akibat ledakan penduduk usia kerja yang disebabkan oleh menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya umur harapan hidup. Di satu sisi, kondisi ini bisa mendatangkan keuntungan ekonomis apabila suplai tenaga kerja yang sedemikian besar disertai dengan kualitas yang baik dan terserap di lapangan usaha yang produktif. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka situasi ini justru akan menjadi beban pembangunan.

Banyak hal dapat dijelaskan dalam kehidupan sosial di masyarakat, jika mengetahui komposisi penduduk yang bekerja atau mencari kerja menurut umur, jenis kelamin, lapangan pekerjaan, maupun status pekerjaan. Dari data tersebut, dapat diperoleh gambaran antara lain tentang kelompok usia yang paling banyak bekerja atau menganggur, besaran penduduk perempuan yang berpartisipasi di pasar kerja. Selain itu, dapat juga diketahui besaran penduduk lanjut usia bekerja karena tuntutan kebutuhan hidup serta lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

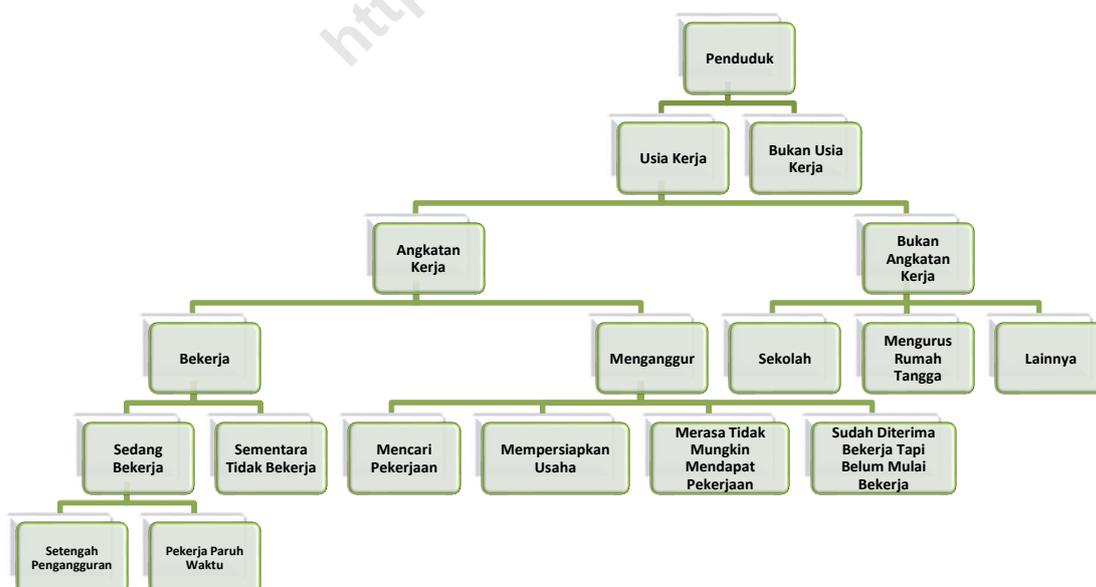
Gambaran situasi ketenagakerjaan ini sekaligus dapat menjadi bahan evaluasi capaian target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ke-8, yaitu meningkatkan partisipasi kerja penduduk laki-laki dan perempuan dan mengurangi pengangguran. Adapun keadaan ekonomi dan kesejahteraan penduduk suatu wilayah cenderung dipengaruhi oleh besaran penduduk yang mempunyai penghasilan. Dengan demikian diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi para pengguna data terutama pengambil kebijakan dalam menyusun kebijakan kependudukan menyangkut ketenagakerjaan.

## 1.2 Konsep dan Definisi

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas sejak tahun 1984 menggunakan Konsep Baku Angkatan Kerja (*Standard Labour Force Concept*) yang tertuang dalam *International Conference of Labour Statisticians (ICLS)* ke-13 tahun 1982. Pada tahun 2013, *International Labour Organization (ILO)* menyelenggarakan ICLS ke-19 yang menghasilkan beberapa pengembangan konsep definisi variabel-variabel ketenagakerjaan, serta menyesuaikan konsep aktivitas produktif (yang dalam ICLS ke-19 disebut dengan *work*) dengan batasan produksi yang mengacu pada *System National Account (SNA)* 2008.

Konsep ICLS ke-13 membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja, seperti diagram di bawah ini:

**Gambar 1.1 Bagan Penduduk Usia Kerja**



Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut di Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut:

1. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk berusia 15 tahun dan lebih.
2. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
3. **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia yang seluruh waktunya atau sebagian besar waktunya digunakan untuk sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dan tidak bekerja.
4. **Angka partisipasi angkatan kerja** adalah indikator yang digunakan untuk melihat besaran mereka yang aktif secara ekonomi. Angka ini dihasilkan dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja dikalikan 100.
5. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi memproduksi barang atau jasa dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
6. **Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

Contoh:

- Pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
- Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah).
- Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya.

Seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial dan sebagainya.

7. **Rasio pekerja** adalah proporsi penduduk bekerja terhadap penduduk usia kerja.

8. **Penganggur terbuka**, terdiri dari :

- Mereka yang mencari pekerjaan,
- Mereka yang mempersiapkan usaha,
- Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa),
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Seseorang digolongkan sebagai pencari kerja apabila pada saat survei tidak punya pekerjaan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, mereka dapat terdiri dari:

- Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan,
- Yang sudah pernah bekerja namun karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan,
- yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan.

9. **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila ada "tindakan nyata", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya. Mempersiapkan suatu usaha, nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) yaitu dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar maupun dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

**Penjelasan:**

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

10. **Angka pengangguran terbuka** adalah indikator yang digunakan untuk melihat gambaran pengangguran di suatu wilayah. Angka ini dihasilkan dari perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 100.
11. **Pekerja tidak penuh** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak penuh terdiri dari:
  - **Setengah Penganggur** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
  - **Pekerja paruh waktu** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.
12. **Angka Setengah Pengangguran (*Underemployment Rate*)** adalah indikator yang digunakan untuk melihat kontribusi setengah pengangguran dalam pasar tenaga kerja. Angka ini dihasilkan dari perbandingan antara jumlah setengah penganggur dan jumlah mereka yang bekerja dikalikan 100.
13. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk yang sedang libur sekolah.
14. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan atau anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu/asisten rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.

15. **Kegiatan lainnya** adalah kegiatan aktif seseorang di luar kegiatan bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga, seperti olahraga, kursus, piknik, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan. Tidak termasuk tidur, malas-malasan, nonton, santai, bermain, dan tidak melakukan kegiatan apapun.
16. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
17. **Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan** adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.
18. **Lapangan Pekerjaan** adalah suatu bidang kegiatan dari tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja meliputi:
  - Sektor Primer terdiri dari pertanian; pertambangan dan penggalian.
  - Sektor Sekunder terdiri dari industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; dan konstruksi.
  - Sektor Tersier terdiri dari perdagangan, rumah makan dan akomodasi; transportasi, pergudangan dan komunikasi; lembaga keuangan, *real estate*, usaha persewaan dan jasa keuangan; jasa-jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan.
19. **Jenis pekerjaan/jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja.
20. **Upah/gaji bersih** adalah imbalan/penghasilan yang diterima oleh seseorang yang bekerja selama sebulan baik berupa uang maupun barang.
21. **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan, yaitu:
  - **Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis dan tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

- **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri dengan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- **Buruh/Karyawan/Pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

**Penjelasan:**

Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir (khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan). Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

- **Pekerja bebas di pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
- **Pekerja bebas di nonpertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industry; listrik, gas dan air; konstruksi/bangunan; perdaganga; angkutan,

pergudangan dan komunikasi; keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan; jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

- **Pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari: (1) anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah, (2) bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung, (3) bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.

22. **Pekerja Rentan** adalah pekerja yang mempunyai status berusaha sendiri, pekerja bebas (pertanian dan nonpertanian), dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Persentase pekerja rentan dihasilkan dari perbandingan antara jumlah pekerja rentan dan jumlah pekerja dikalikan 100.

**Penjelasan:**

Pekerja ini rentan terhadap gejolak ekonomi dengan kondisi kerja di bawah standar, risiko tinggi, berpenghasilan rendah dengan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

23. **Kegiatan Informal** adalah suatu kegiatan usaha dari seseorang dengan status/kedudukan pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar/tidak tetap, pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja tidak dibayar.

24. **Pekerja Informal** adalah penduduk usia kerja yang bekerja dengan status/kedudukan pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar/tidak tetap, pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja tidak dibayar.

25. **Pekerja Miskin** adalah pekerja yang tingkat ekonominya berada di bawah garis kemiskinan. **Angka Pekerja Miskin** diperoleh dari perkalian antara persentase penduduk miskin dengan jumlah angkatan kerja kemudian dibagi jumlah orang yang bekerja.

# PROFIL KETENAGAKERJAAN

Bab ini secara khusus akan membahas tentang situasi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara menurut umur, jenis kelamin, kabupaten/kota, dan daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan).

## 2.1 Profil Penduduk Usia Kerja: Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja

Terminologi penduduk usia kerja dalam publikasi ini adalah penduduk berusia 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja terbagi dalam 2 kelompok yakni Angkatan kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kelompok Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi baik bekerja ataupun penduduk yang mencari pekerjaan. Sementara itu bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi. Kelompok penduduk ini aktivitas utamanya adalah sekolah atau mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan aktif lainnya.

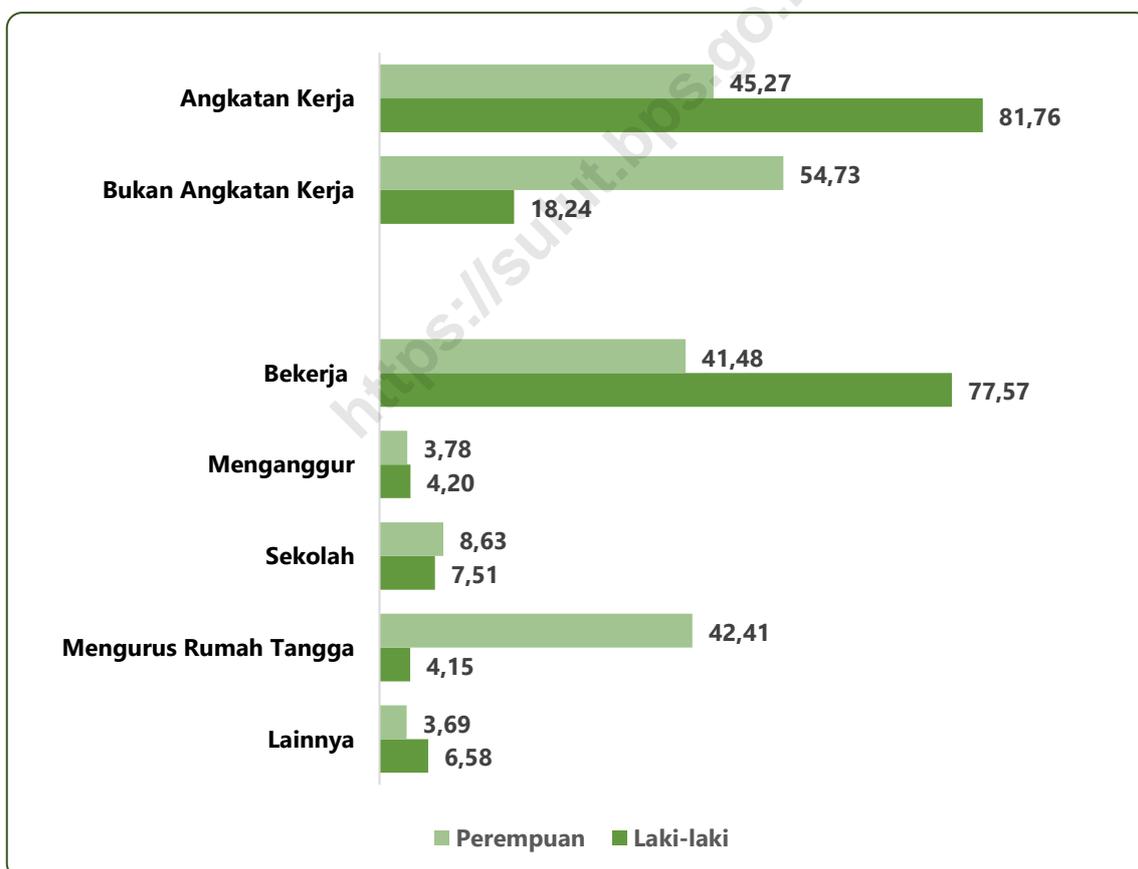
**Tabel 2.1 Situasi Tenaga Kerja di Sulawesi Utara  
Agustus 2018 dan Agustus 2019**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2018 (orang)	Agustus 2019 (orang)
(1)	(2)	(3)
<b>Penduduk Usia Kerja</b>	<b>1 866 055</b>	<b>1.889.885</b>
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>1 175 809</b>	<b>1.207.006</b>
Bekerja	1 095 145	1.131.521
Menganggur	80 664	75.485
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>690 246</b>	<b>682.879</b>
Bersekolah	143 337	152.296
Mengurus Rumah Tangga	441 804	432.982
Kegiatan Aktif Lainnya	105 105	97.601
<b>Indikator Ketenagakerjaan</b>	<b>Persen</b>	
Angka Pengangguran Terbuka	6,86	6,25
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	63,01	63,87
Angka Setengah Pengangguran	8,25	6,46

Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2018 dan 2019, diolah.

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, jumlah penduduk usia kerja atau tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus 2019 kian meningkat, yaitu sebanyak 1,89 juta orang atau naik 1,28 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Dari sejumlah penduduk usia kerja tersebut, 63,87 persen merupakan angkatan kerja sedangkan sisanya adalah bukan angkatan kerja. Persentase penduduk yang merupakan angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 0,86 poin dibandingkan kondisi Agustus 2018. Hal ini dikarenakan jumlah kelompok angkatan kerja yang bertambah, sementara jumlah kelompok bukan angkatan kerja berkurang selama setahun terakhir.

**Gambar 2.1**  
**Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin**  
**di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019**



Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019, diolah.

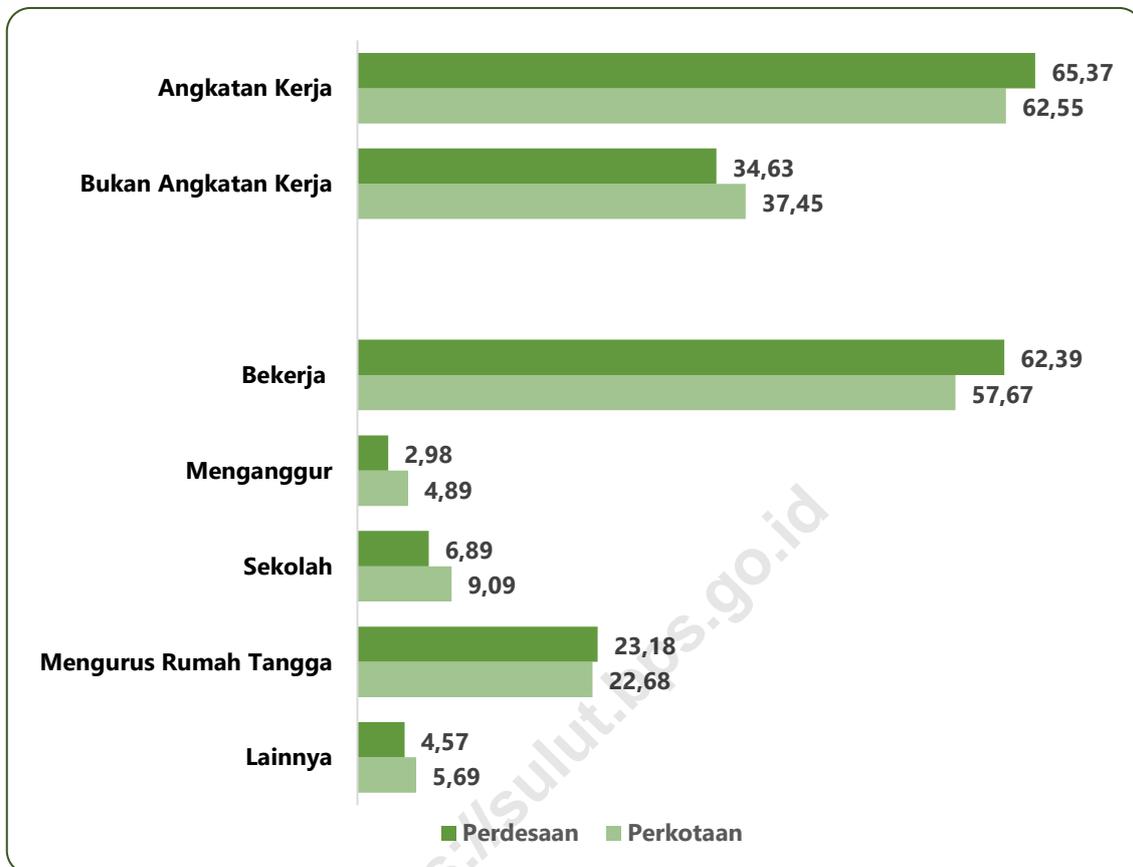
Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang tidak aktif secara ekonomi lebih tinggi daripada yang aktif. Meski persentase penduduk perempuan yang bekerja pada Agustus 2019 meningkat dibandingkan bulan yang sama

tahun sebelumnya, persentase penduduk perempuan yang mengurus rumah tangga (42,41 persen) masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk perempuan yang bekerja. Hanya 41,48 persen penduduk perempuan yang bekerja. Dibandingkan dengan penduduk laki-laki, persentase angkatan kerja perempuan pada Agustus 2019 lebih dari separuh persentase angkatan kerja penduduk laki-laki. Pemahaman bahwa mengurus rumah tangga adalah tugas perempuan dan bekerja adalah tugas laki-laki nampaknya masih berlaku di kalangan masyarakat Sulawesi Utara.

Sementara persentase mereka yang bersekolah antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, yakni di kisaran 7-8 persen. Hal ini mengindikasikan adanya kesetaraan gender dari sisi pendidikan, yaitu penduduk perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan penduduk laki-laki untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Partisipasi yang seimbang dalam pendidikan dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan, dan pada gilirannya akan memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi, meskipun harus diakui bahwa kultur di sebagian besar wilayah Indonesia akan membuat kaum perempuan cenderung memilih untuk mengurus rumah tangga dibandingkan kaum laki-laki.

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, persentase angkatan kerja di perkotaan relatif lebih rendah dibanding dengan mereka yang tinggal di perdesaan, yaitu 62,55 persen berbanding 65,37 persen. Kondisi tersebut berbeda pada kelompok bukan angkatan kerja dimana di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding di daerah perdesaan yakni 37,45 persen berbanding 34,63 persen. Dari 62,55 persen tenaga kerja di perkotaan, hanya 57,67 persen yang bekerja dan angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan di perdesaan. Peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan didukung oleh tingkat ekonomi yang umumnya lebih baik di perkotaan memberi kesempatan penduduk perkotaan memilih terlibat aktif dalam pendidikan. Sementara itu, kemiskinan yang umumnya lebih tinggi di daerah perdesaan mendorong penduduk untuk terus bekerja meskipun dengan upah yang rendah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan tidak jarang yang terpaksa putus sekolah karena harus membantu orang tua mencari penghasilan.

**Gambar 2.2**  
**Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019**



Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019, diolah.

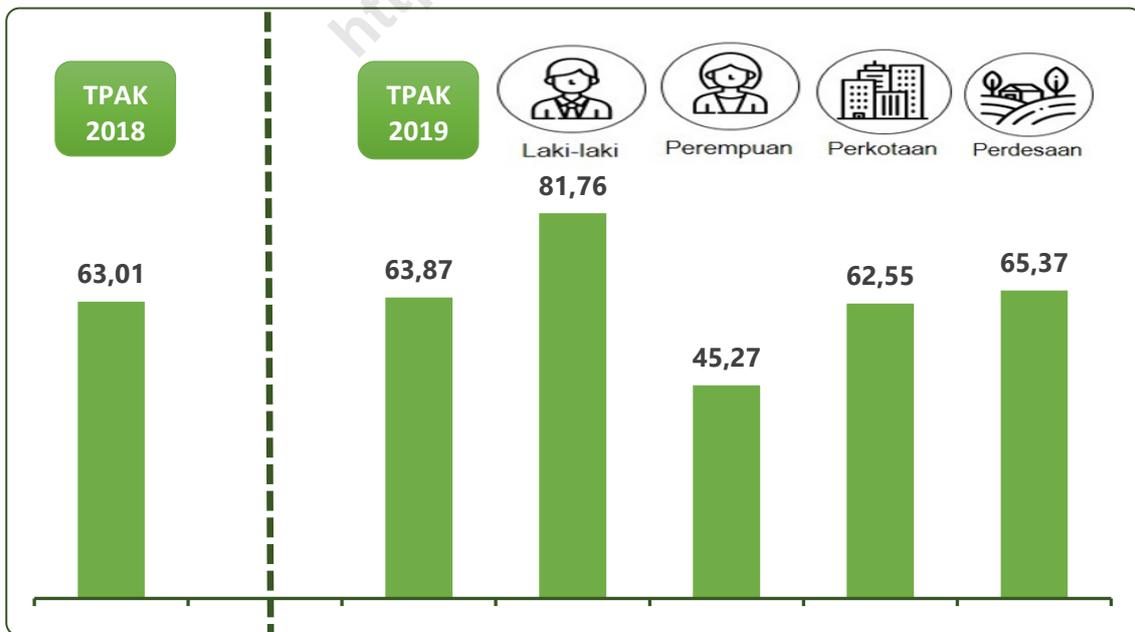
## 2.2 Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja atau tenaga kerja. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan tentang kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif (angkatan kerja) untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan besaran – besaran yang mempengaruhi TPAK.

TPAK penduduk Sulawesi Utara tahun 2019 sebesar 63,87 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK pada tahun 2018 yaitu sebesar 63,01 persen. Peningkatan angka TPAK tersebut mengindikasikan terjadinya pergeseran kecenderungan penduduk yang semula merupakan penduduk usia ekonomi tidak aktif (bukan angkatan kerja) menjadi penduduk usia ekonomi aktif (angkatan kerja).

TPAK sebesar 63,87 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja terdapat 63-64 orang yang aktif secara ekonomi. Jika dilihat dari jenis kelaminnya, angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan angkatan kerja perempuan dengan APAK laki-laki hampir dua kali lebih banyak dibandingkan APAK perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih sedikit perempuan yang aktif secara ekonomi. Padahal, salah satu cara untuk dapat memaksimalkan keuntungan ekonomis dari adanya ledakan penduduk usia kerja adalah dengan meningkatkan angka partisipasi perempuan di pasar kerja. Dengan demikian, diperlukan upaya membantu para perempuan terutama yang sudah menikah untuk dapat menjalankan peran ganda yaitu sebagai pekerja dan ibu rumah tangga.

**Gambar 2.3**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2018-2019**

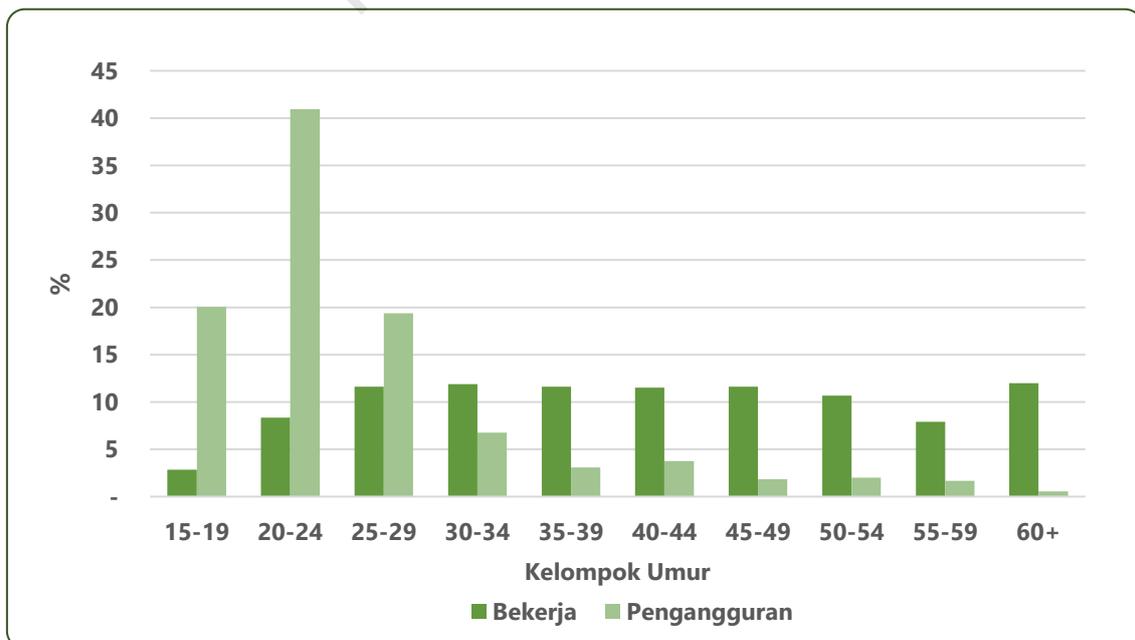


Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019, diolah.

Sementara itu jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk perkotaan yang aktif secara ekonomi lebih rendah dibandingkan mereka yang tinggal di pedesaan. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan sifat pekerjaan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Struktur ekonomi pedesaan lebih fleksibel karena lebih banyak usaha yang bersifat informal dan sebagian besar lapangan pekerjaan yang ada di pedesaan adalah sektor–sektor tradisional yang relatif kurang membutuhkan kualifikasi tertentu bagi tenaga kerja yang akan memasukinya. Selain itu, sifat dan aktifitas pekerjaan masih dalam lingkungan rumahtangga atau keluarga, bahkan memungkinkan sekali kaum perempuan pedesaan bekerja sambil mengasuh anak. Berbeda dengan di daerah perkotaan yang sebagian besar jenis pekerjaannya lebih bersifat formal dan membutuhkan kualifikasi tertentu bagi tenaga kerja yang akan memasukinya.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, mereka yang terserap di pasar kerja pada Agustus 2019 pun bertambah sebesar 3,32 persen. Sebaliknya, jumlah dan persentase penganggur berkurang. Angka pengangguran terbuka pada Agustus 2019 tercatat turun 0,61 poin dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

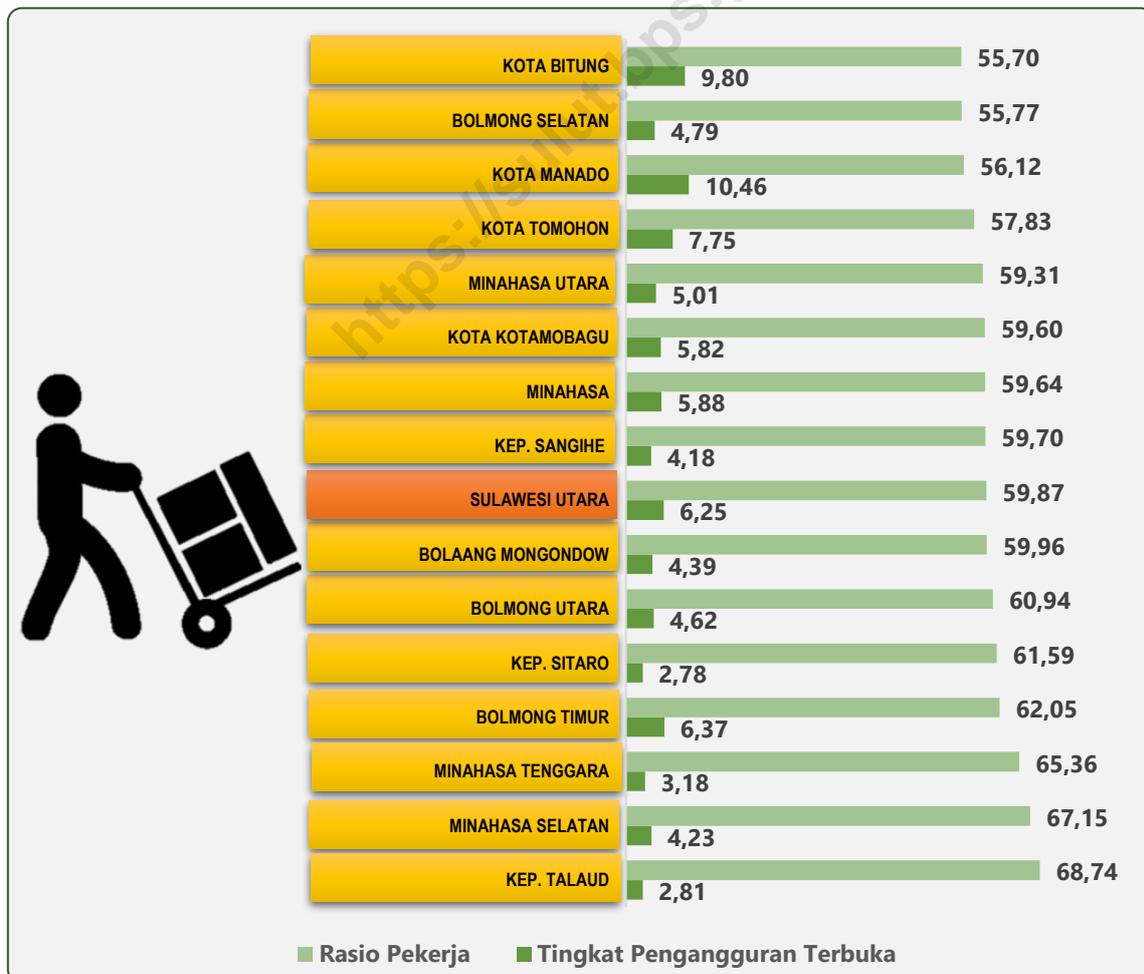
**Gambar 2.4**  
**Persentase Angkatan Kerja Menurut Kegiatan Utama dan Kelompok Umur**  
**di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019**



Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019, diolah.

Dilihat dari kelompok umurnya, pola angkatan kerja yang terbentuk adalah U terbalik yang artinya makin bertambah usia, persentase yang bekerja ataupun menganggur makin besar, namun setelah memasuki umur tertentu, persentasenya makin kecil. Gambar 2.4 menunjukkan bahwa penduduk umur 15-29 tahun lebih banyak yang menganggur daripada yang bekerja padahal kelompok tersebut dapat dikatakan masih tergolong *fresh graduate*. Sementara itu, penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) justru masih banyak yang bekerja walaupun persentasenya tidak terlalu besar. Penduduk yang paling banyak bekerja adalah mereka yang berada di kelompok umur 35 – 39 tahun, sementara penduduk yang paling banyak menganggur adalah mereka yang tergolong muda, yakni berada di kelompok umur 20 – 24 tahun.

**Gambar 2.5**  
**Rasio Pekerja dan Angka Pengangguran Terbuka**  
**Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019**



Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019, diolah.

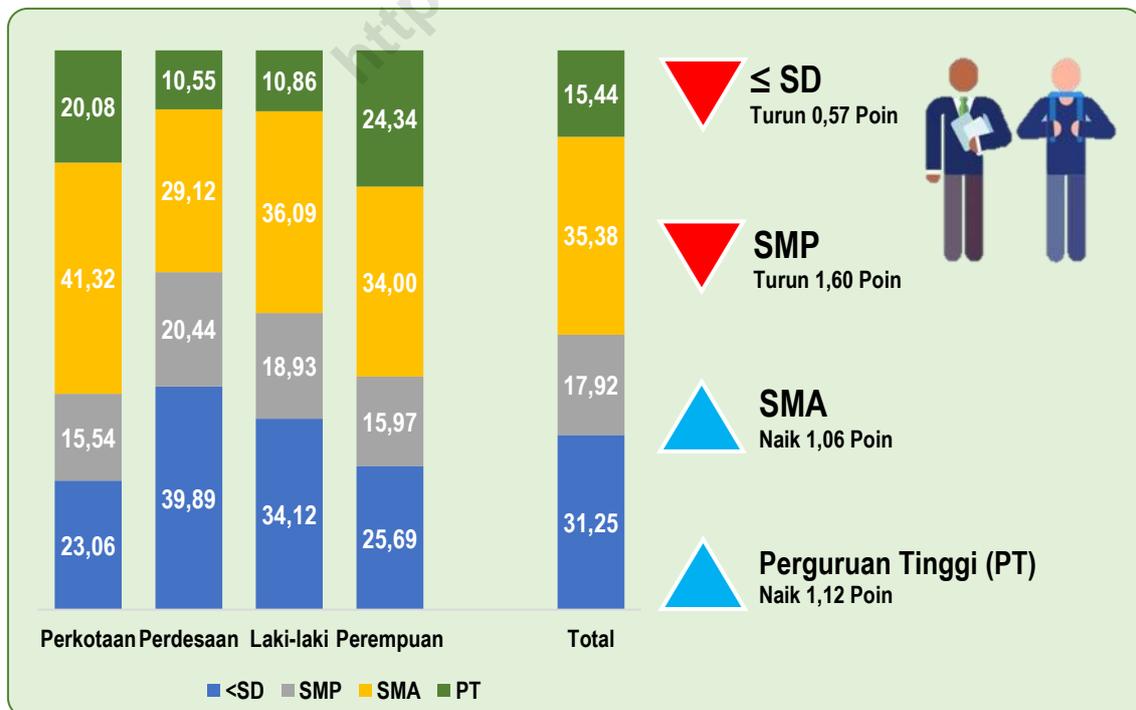
Dilihat dari rasio pekerja (lihat Gambar 2.5), besaran rasio di atas 50 persen menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar penduduk di Sulawesi Utara bekerja. Namun jika diperhatikan per kabupaten/kota, rasio pekerja di kota-kota besar lebih rendah dibandingkan di kabupaten, kecuali kota Kotamobagu. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu alasan penduduk di kabupaten lebih banyak yang bekerja. Selain itu, rasio pekerja di ketiga kota di Sulawesi Utara tersebut juga berada di bawah rasio provinsi yang sebesar 59,87 persen, dengan rasio terendah di Kota Bitung.

### 2.3 Profil Penduduk yang Bekerja

#### 2.3.1 Penduduk yang Bekerja menurut Pendidikan

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kualitas seorang pekerja adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Hasil Sakernas Agustus 2019 menunjukkan bahwa kualitas pekerja di Sulawesi Utara masih tergolong rendah, yakni separuhnya hanya tamat pendidikan SMP ke bawah.

**Gambar 2.6**  
**Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019**

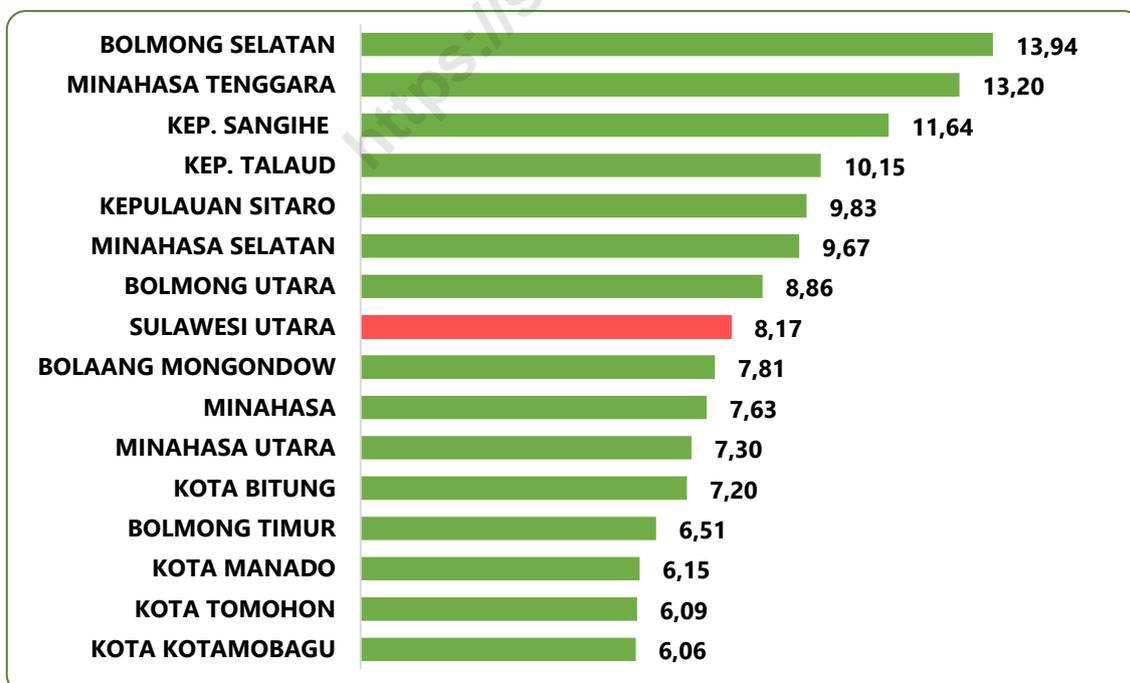


Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019, diolah.

Dari Gambar 2.6 juga terlihat bahwa pekerja perempuan yang berpendidikan menengah ke atas lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sepertiga penduduk perempuan yang masuk pasar kerja memiliki ijazah SLTA, bahkan mereka yang tamat dari perguruan tinggi mencapai lebih dari 20 persen. Sementara itu, jika dilihat dari daerah tempat tinggal, mayoritas pekerja di daerah perkotaan berpendidikan menengah ke atas, sebaliknya di daerah perdesaan lebih banyak yang hanya tamat SMP ke bawah.

Masalah ketenagakerjaan lain yang dihadapi Sulawesi Utara adalah pekerja miskin. Dengan bekal pendidikan dasar, mereka hanya mampu terserap pada pekerjaan dengan tingkat upah rendah dan berakibat mereka sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Tingkat pekerja miskin di Sulawesi Utara Tahun 2019 adalah 8,17, artinya dari 100 orang pekerja, 8 orang diantaranya adalah pekerja miskin (Gambar 2.7). Angka tertinggi terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan yang terendah ada di Kota Kotamobagu.

**Gambar 2.7**  
**Tingkat Pekerja Miskin Menurut Kabupaten/kota**  
**di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019**



*Catatan: Penghitungan tingkat pekerja miskin merupakan hasil justifikasi dari persentase penduduk miskin (Maret 2019) dengan jumlah orang yang bekerja dan angkatan kerja (Agustus 2019).*

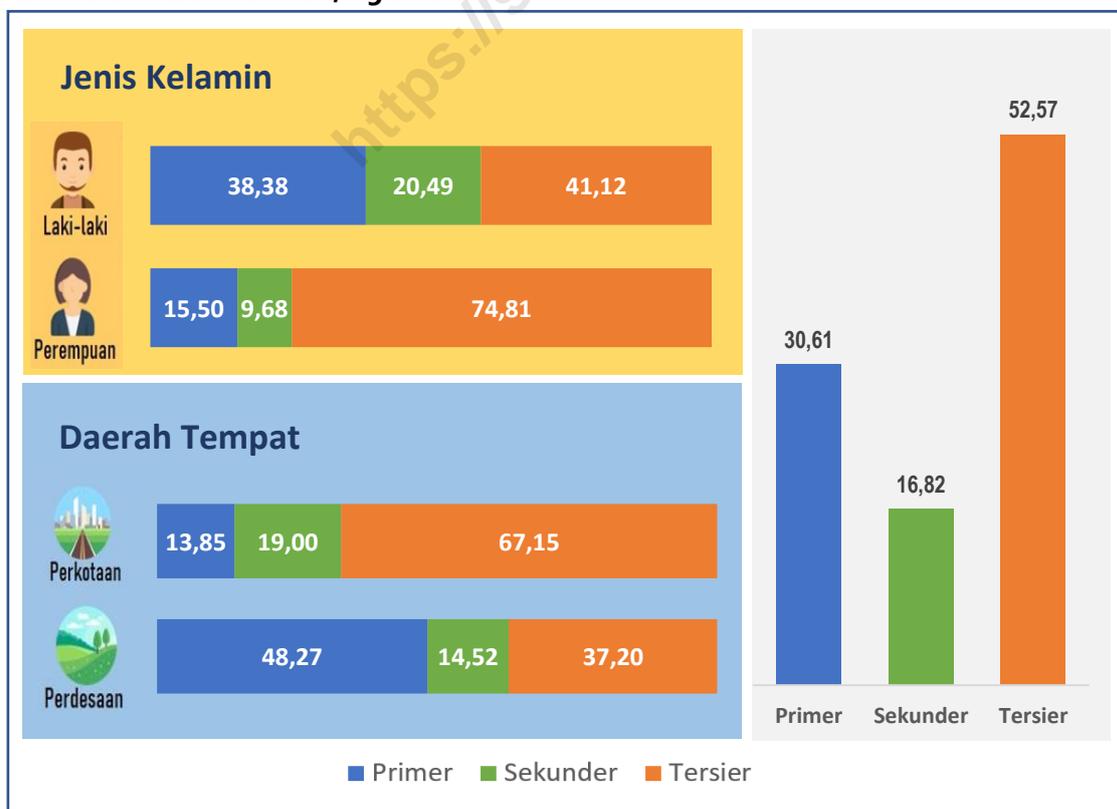
*Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019, diolah.*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menurunkan angka pengangguran selalu menjadi fokus utama dalam setiap perumusan kebijakan ketenagakerjaan, padahal masih terdapat masalah penting lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti pekerja miskin. Secara status mereka bekerja, namun partisipasi mereka di pasar kerja lebih didorong oleh tuntutan ekonomi yang mendesak mereka untuk terus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar.

### 2.3.2 Penduduk yang Bekerja menurut Sektor Lapangan Pekerjaan

Gambar 2.8 menunjukkan bahwa separuh pekerja di Sulawesi Utara pada Agustus 2019 terserap di sektor tersier (perdagangan, rumah makan dan akomodasi; transportasi, pergudangan dan komunikasi; lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa keuangan; jasa-jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan). Namun, persentase mereka yang bekerja di sektor primer (pertanian; pertambangan dan penggalian) juga masih cukup besar.

**Gambar 2.8**  
**Persentase Pekerja Menurut Sektor, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019**



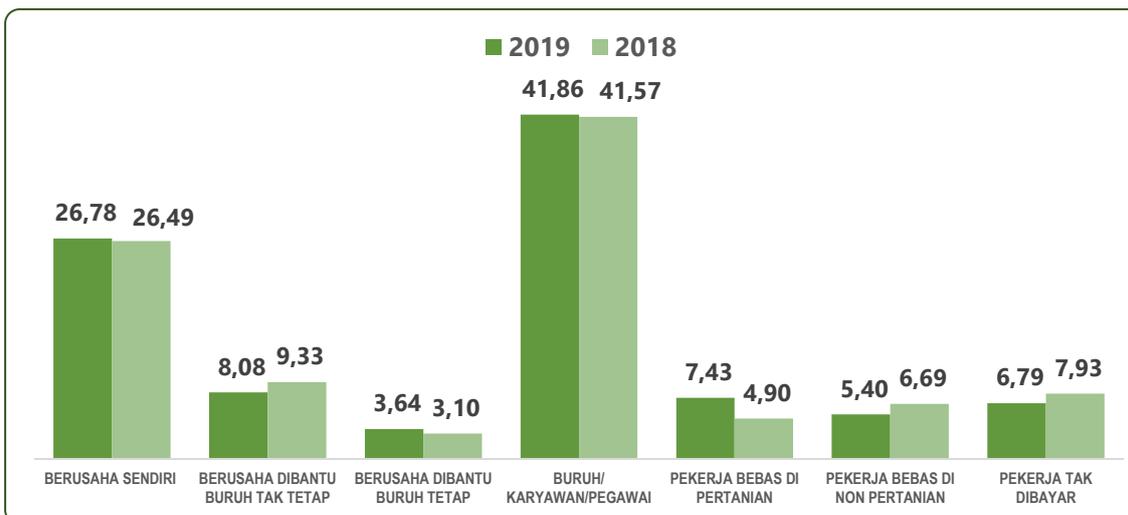
Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019, diolah.

Jika dilihat dari jenis kelamin, proporsi perempuan yang bekerja di sektor tersier hampir dua kali lipat lebih tinggi dari proporsi laki-laki yang bekerja di sektor tersebut. Pekerja laki-laki lebih banyak terserap di sektor primer yang mengandalkan tenaga/fisik, sedangkan penduduk perempuan yang bekerja di sektor primer umumnya merupakan pekerja keluarga yang membantu anggota rumah tangga lainnya. Sementara jika dilihat dari daerah tempat tinggal, tampak jelas bahwa pekerja di perdesaan lebih banyak terserap di sektor primer, sedangkan mayoritas pekerja di perkotaan bekerja di sektor tersier. Selain itu, sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; dan konstruksi), kecuali di daerah perkotaan.

### 2.3.3 Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan

Hasil Sakernas Agustus 2019 menunjukkan bahwa pekerja di Sulawesi Utara paling banyak berstatus buruh/karyawan. Dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, persentase pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga dan pekerja bebas di non pertanian mengalami penurunan. Kenaikan persentase pekerja dengan status pekerja bebas pertanian merupakan yang tertinggi, yakni sebesar 2,53 poin.

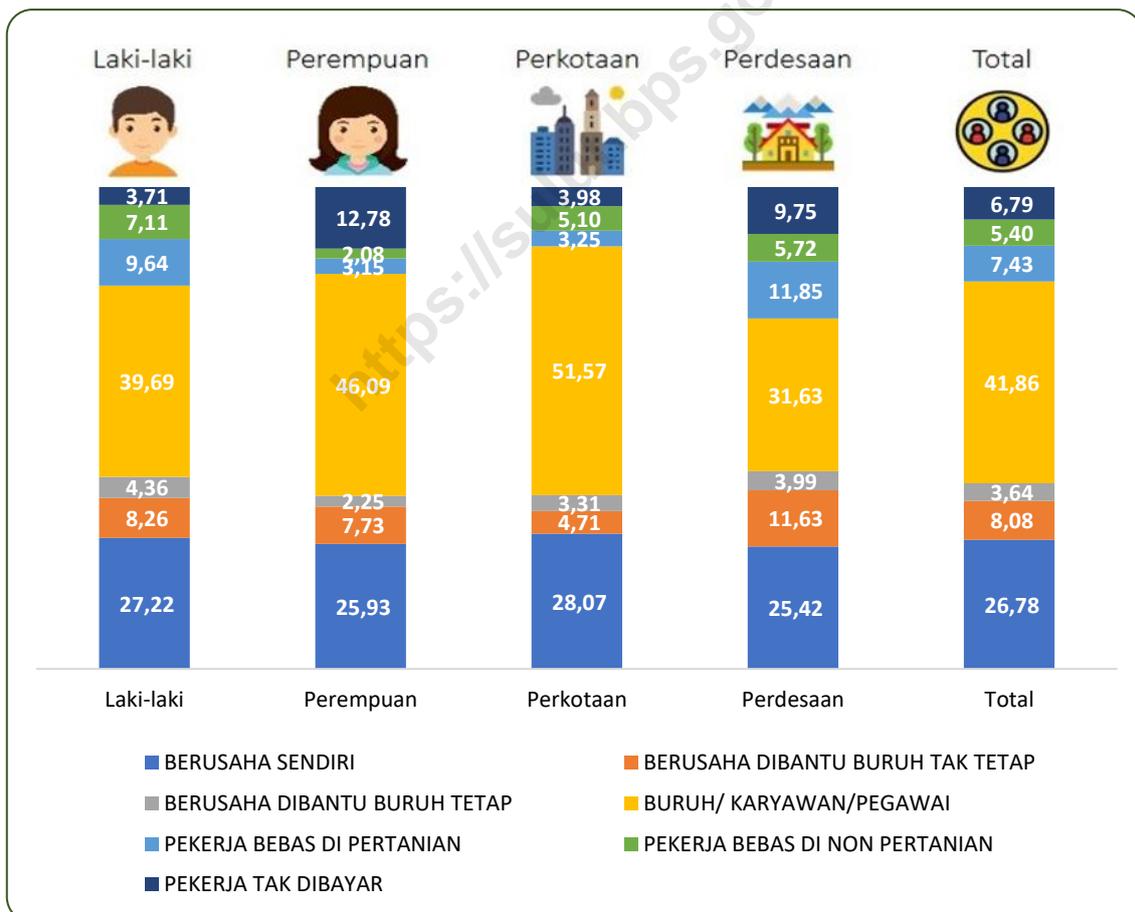
**Gambar 2.9**  
**Persentase Pekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2018-2019**



Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2017-2018, diolah.

Persentase perempuan yang menjadi buruh/karyawan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, begitupun persentase buruh/karyawan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan yang ada di perdesaan. Sebaliknya status pekerjaan dengan persentase terkecil dibandingkan status pekerjaan lainnya adalah berusaha dibantu buruh tetap, baik di perkotaan maupun perdesaan, laki-laki maupun perempuan. Selain itu, dari Gambar 2.10 pun terlihat bahwa persentase pekerja perempuan yang menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar lebih dari tiga kali lipat dibandingkan persentase laki-laki yang menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar. Umumnya di Sulawesi Utara pekerja perempuan membantu anggota rumah tangga lainnya di sektor pertanian.

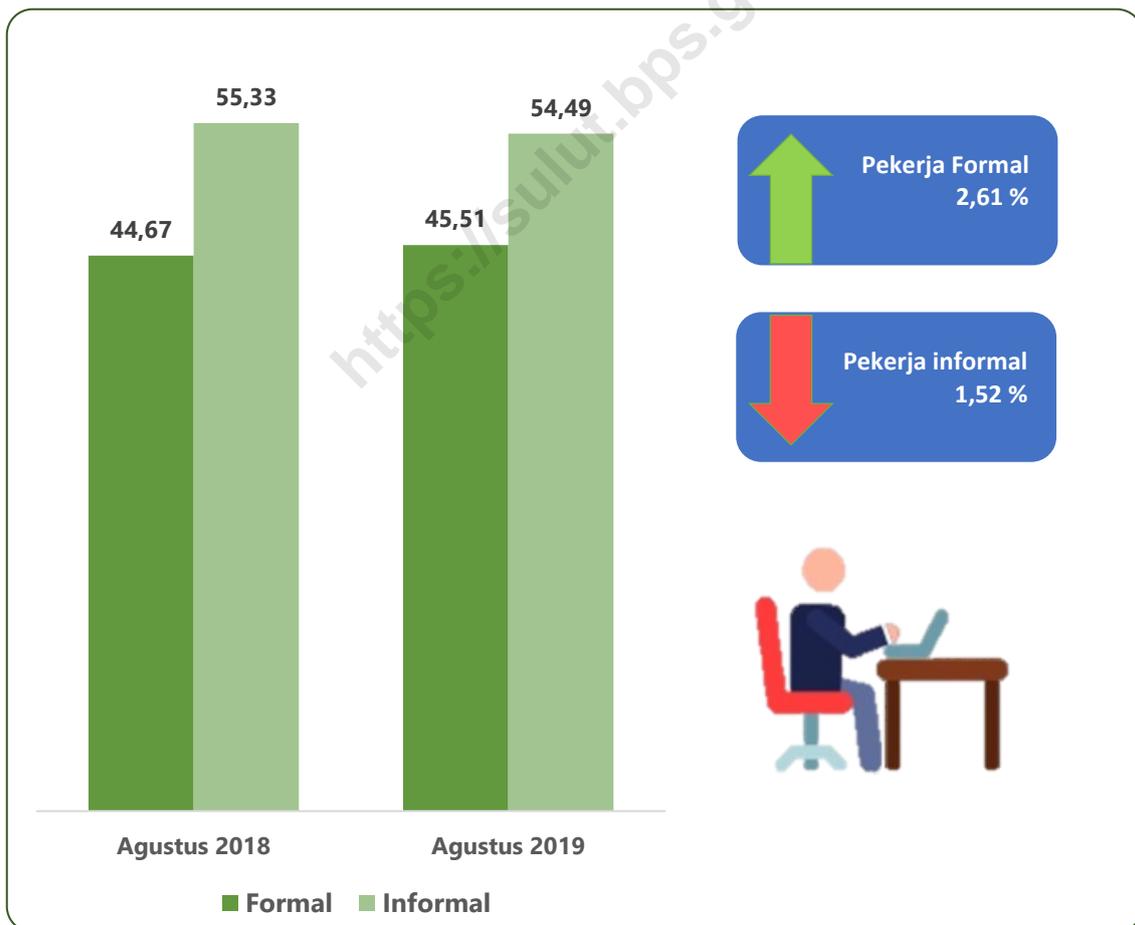
**Gambar 2.10**  
**Persentase Pekerja Menurut Status Pekerjaan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019**



Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019, diolah.

Dari status pekerjaan dapat dihitung proksi jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal. Penduduk yang bekerja di sektor informal adalah mereka yang status pekerjaannya berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar. Dilihat dari Gambar 2.11, proporsi pekerja informal masih lebih separuh dari total pekerja. Namun demikian proporsinya mengalami penurunan sebesar 1,52 poin dari Agustus 2018 ke Agustus 2019. Hal ini didorong oleh penurunan serapan pekerja di salah satu sektor informal, yaitu pekerja bebas di non pertanian. Sementara peningkatan sektor formal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah peningkatan persentase buruh/karyawan yang cukup besar.

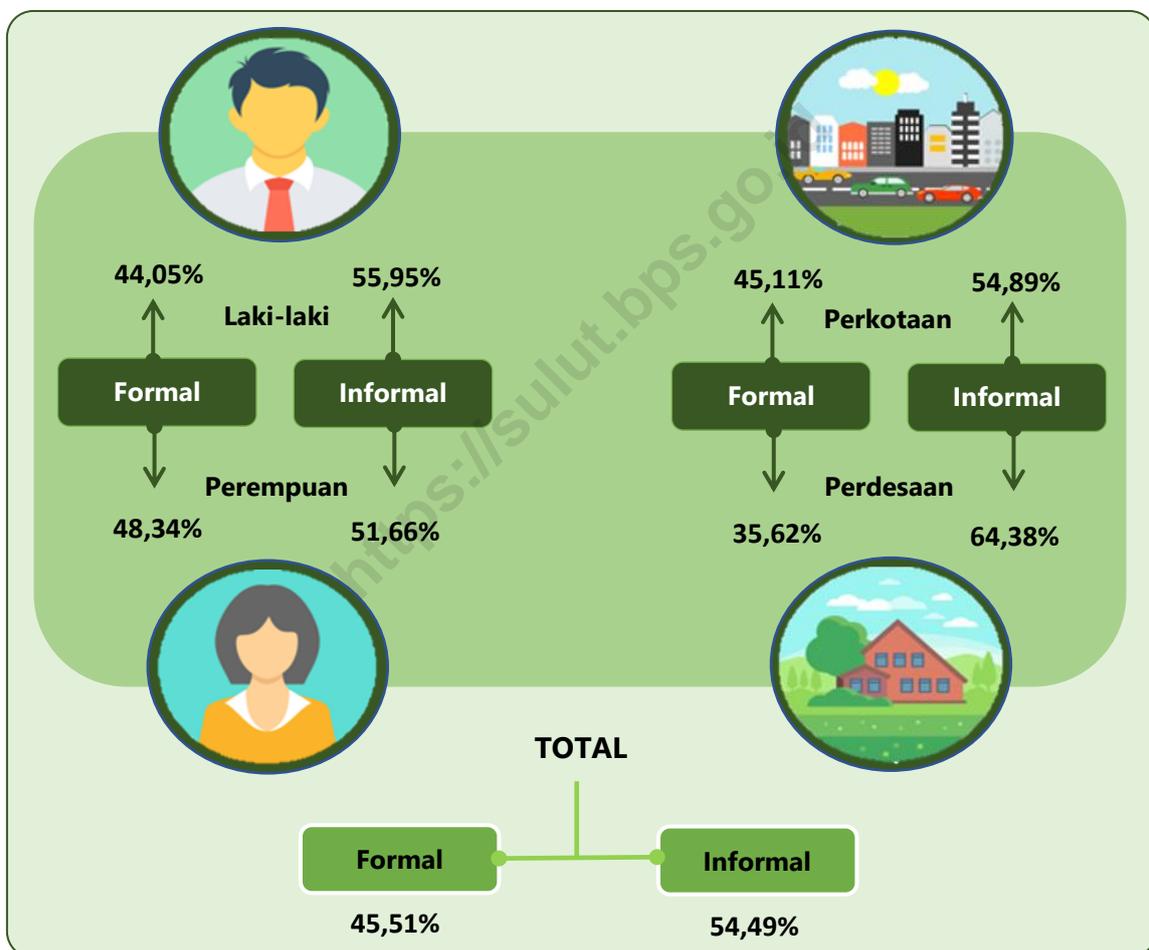
**Gambar 2.11**  
**Persentase Pekerja Formal dan Informal di Provinsi Sulawesi Utara**  
**Agustus 2018- 2019**



Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2018-2019, diolah.

Baik laki-laki maupun perempuan paling banyak bekerja di sektor informal. Sementara jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, tampak jelas bahwa di daerah perdesaan lebih banyak pekerja informal dibandingkan formal, sebaliknya di perkotaan lebih banyak pekerja formal. Hal ini sesuai dengan karakteristik penduduk perdesaan yang identik dengan usaha pertanian, yang umumnya bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak dibayar/tidak tetap dan juga pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

**Gambar 2.12**  
**Persentase Pekerja Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019**

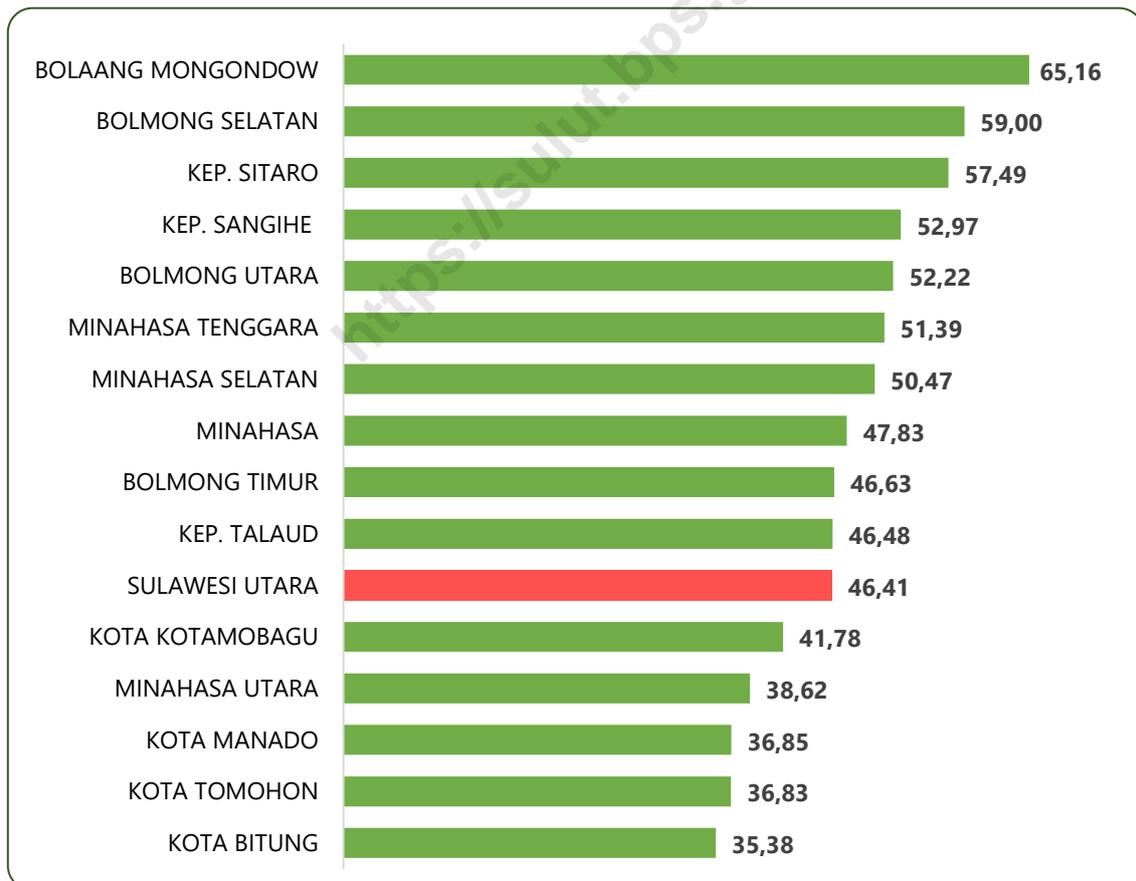


Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019, diolah.

Status kerentanan pekerja juga dapat dilihat dari data status pekerjaan pekerja. Merujuk pada Laporan Ketenagakerjaan Indonesia yang diterbitkan oleh *International Labour Organization (ILO)*, pekerja rentan terdiri dari kelompok pekerja dengan status berusaha sendiri, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Kelompok pekerja

ini disebut rentan karena terlibat dalam pekerjaan tidak tetap atau tak berupah berada dalam kondisi kerja yang lebih rentan tanpa adanya jaminan sosial dan standar kerja yang rendah secara umum. Pekerja rentan di Sulawesi Utara berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2019 adalah sebesar 46,41 persen, artinya dari 100 orang pekerja, 46-47 orang diantaranya merupakan pekerja rentan. Angka ini meningkat 0,41 poin dibandingkan kondisi Agustus tahun lalu. Dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, ada tujuh kabupaten yang lebih dari separuh pekerjanya adalah pekerja rentan dan persentase terbesar ada di Bolaang Mongondow, yakni di atas 65,16 persen. Sementara untuk kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara lebih banyak pekerja yang berstatus buruh, berusaha dibantu buruh tetap, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap.

**Gambar 2.13**  
**Persentase Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019**



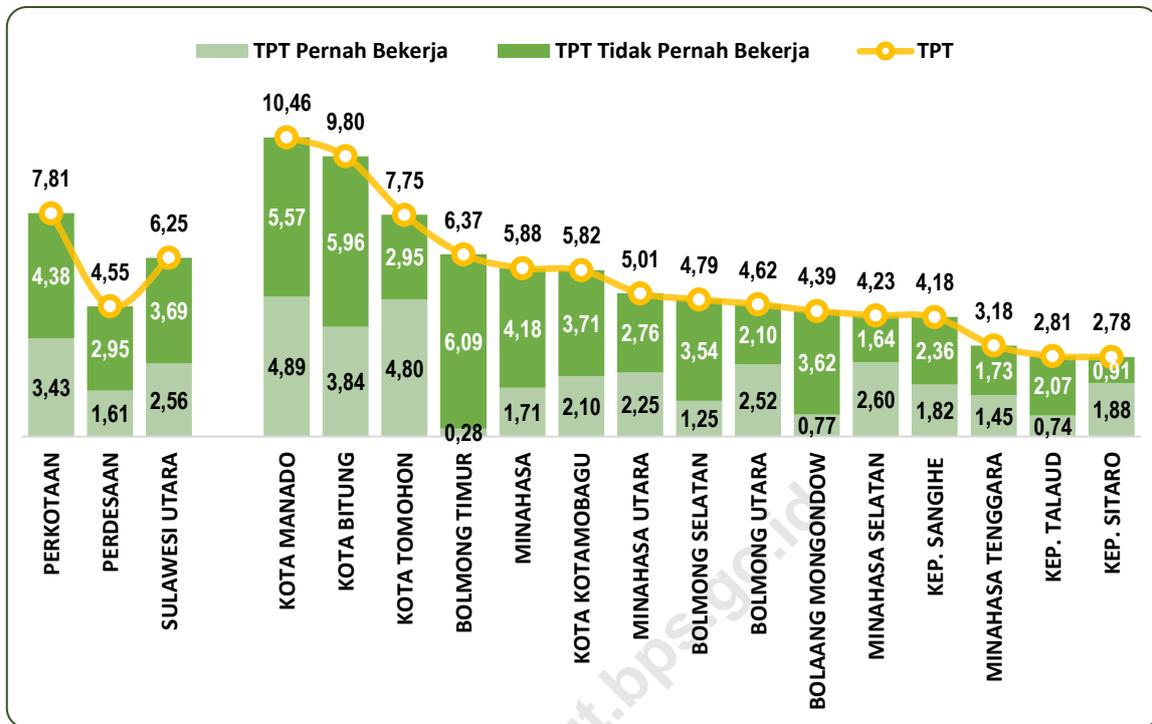
Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019, diolah.

## 2.4 Profil Pengangguran

Penduduk yang menganggur terdiri dari empat komponen yaitu penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha (tidak bekerja), penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja serta penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Utara pada Tahun 2019 sebesar 6,25 persen, dimana 3,69 persennya adalah TPT yang belum pernah bekerja dan 2,56 persennya adalah TPT yang sudah pernah bekerja. TPT tersebut mengalami penurunan sebesar 0,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara absolut, angka pengangguran di Sulawesi Utara pada Tahun 2019 masih relatif tinggi yaitu sebesar 75.485 orang, dimana 59,07 persen **diantaranya belum pernah bekerja**. Hal ini menunjukkan masih banyaknya pencari kerja yang baru pertama kali masuk ke pasar kerja yang tidak tertampung oleh lapangan kerja yang ada, sehingga menyebabkan mereka terpaksa menganggur. Untuk itu, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup banyak agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut.

Gambar 2.14 memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan selain karena pengaruh pertumbuhan alamiah penduduk, kemungkinan juga karena dipengaruhi oleh arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan atau dari daerah lainnya diluar Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu sebagai konsekuensi dari meningkatnya tingkat pendidikan penduduk, akan berpengaruh juga terhadap tingkat pengangguran di daerah perkotaan karena pencari kerja pertama kali yang merasa memiliki pendidikan yang memadai, baik yang berasal dari daerah perkotaan itu sendiri maupun yang berasal dari daerah pedesaan akan terkonsentrasi mencari pekerjaannya di daerah perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Sementara itu kesempatan kerja sektor-sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja, hal tersebut berakibat pada tingginya tingkat pengangguran di daerah perkotaan. Berbeda dengan daerah pedesaan yang pada umumnya tingkat pendidikan penduduknya relatif masih rendah sehingga angkatan kerja yang ada tidak mempunyai banyak tuntutan terhadap jenis pekerjaan yang diinginkan dan mau menerima pekerjaan-pekerjaan di sektor informal atau tradisional.

**Gambar 2.14**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019**



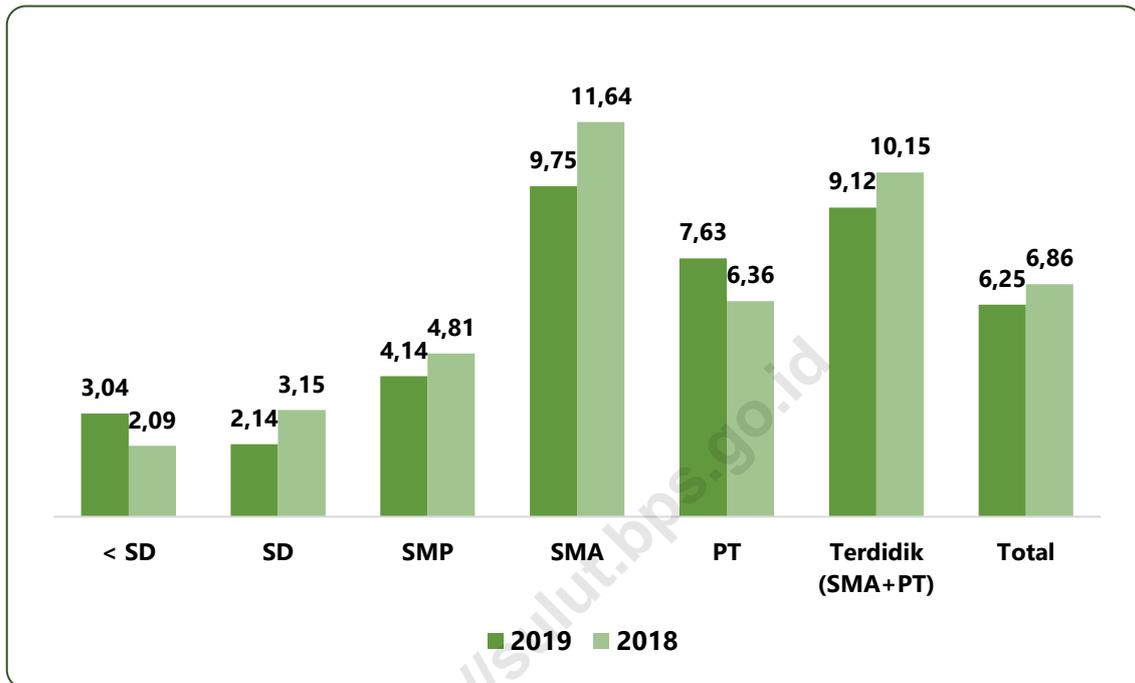
Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019, diolah.

Sementara itu jika diamati menurut kabupaten/kota, angka pengangguran di kota-kota besar seperti Kota Bitung dan Kota Manado cukup tinggi (di atas angka provinsi). Sebagai salah satu pusat industri dan pusat perdagangan di Sulawesi Utara, kesempatan untuk bekerja di kedua kota tersebut tentunya lebih luas daripada di kota/kabupaten lainnya, namun pada kenyataannya masih banyak penduduk usia kerja yang belum terserap di pasar kerja.

Permasalahan lainnya terkait pengangguran yang dihadapi Provinsi Sulawesi Utara adalah tingkat pengangguran terdidik yang relatif masih tinggi. Tingkat pengangguran terdidik didefinisikan sebagai rasio jumlah pencari kerja berpendidikan SLTA keatas (sebagai kelompok terdidik) terhadap angkatan kerja pada kelompok tersebut. Gambar 2.15 memberikan gambaran mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran. Data Sakernas Agustus 2018-2019 memberikan bukti empiris bahwa pendidikan yang tinggi belum merupakan jaminan untuk segera mendapatkan pekerjaan, bahkan pendidikan yang tinggi justru seringkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk masuk dalam pasar tenaga kerja. Terbukti

tingkat pengangguran pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi (PT) lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

**Gambar 2.15**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (%)**  
**di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2018-2019**



Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2018-2019, diolah.

Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Utara menurun, dari sebesar 10,15 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,12 persen pada tahun 2019. Data tersebut mengindikasikan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja berpendidikan SLTA keatas di Sulawesi Utara pada Tahun 2019, sebanyak 9 sampai 10 orang diantaranya sedang menganggur. Dapat diduga bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok pengangguran terdidik adalah para pencari kerja usia muda atau pencari kerja pertama kali yang baru tamat dari pendidikan sekolah (*fresh graduate-new entry*).

Tidak terserapnya tenaga kerja terdidik dalam pasar kerja cenderung disebabkan oleh kekakuan lapangan kerja. Sebagai ilustrasi, pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan para pencari kerja umumnya akan bersikap memilih-milih pekerjaan dan merasa enggan untuk bekerja di kegiatan ekonomi informal. Pilihan utama biasanya adalah bekerja di sektor-sektor formal atau sektor-sektor ekonomi produktif. Padahal

lapangan kerja di sektor-sektor tersebut ketersediaanya sangat terbatas, sehingga mereka terpaksa menganggur.

Permasalahan pengangguran ini dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi permintaan, selain tingkat pendidikan, persyaratan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan mungkin belum mampu dipenuhi oleh tenaga kerja di Sulawesi Utara. Sementara dari sisi penawaran, upah yang ditawarkan pasar kerja mungkin berada di bawah upah yang diinginkan (*reservation wage*) pencari kerja sehingga mereka memilih untuk menganggur sampai menemukan pekerjaan dengan upah yang sesuai harapan mereka.

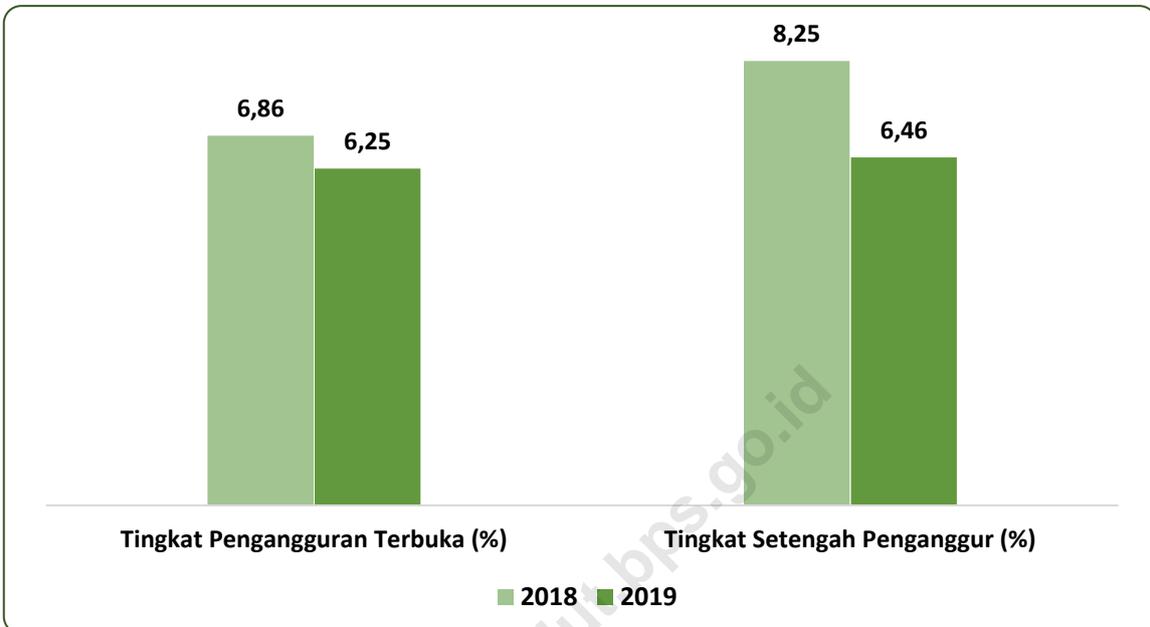
## 2.5 Profil Setengah Pengangguran

Berbeda dengan angka pengangguran yang selalu menjadi sorotan, angka setengah pengangguran seringkali kurang diperhatikan. Mereka yang dikategorikan sebagai setengah pengangguran yaitu mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu dan masih berusaha mencari pekerjaan. Isu setengah pengangguran sama pentingnya bahkan dapat lebih penting daripada isu pengangguran. Hal ini dikarenakan meski setengah penganggur termasuk kelompok pekerja, namun mereka masih menginginkan pekerjaan lain dan berusaha mencari kerja. Termasuk di dalamnya adalah mereka yang ingin bekerja *full-time* tapi hanya bisa mendapatkan pekerjaan *part-time*, atau mereka yang terpaksa harus bekerja di bawah level kemampuannya, atau mereka yang umumnya bekerja di usaha informal dengan jam kerja tak menentu serta upah yang rendah sehingga perlu mencari pekerjaan lain untuk tambahan penghasilan. Angka setengah pengangguran dapat digunakan untuk melihat kontribusi setengah penganggur dalam pasar tenaga kerja.

Meskipun angka setengah pengangguran pada Agustus 2019 lebih rendah dibandingkan ini Agustus 2018, namun angkanya lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran terbuka. Pada Agustus 2019, angka setengah pengangguran adalah 6,46, artinya dari 100 orang yang bekerja, sekitar 6-7 orang diantaranya tergolong bekerja di bawah 35 jam dan masih menginginkan pekerjaan. Angka ini menurun 1,79 poin dibandingkan kondisi Agustus 2018. Adapun keterkaitan antara pengangguran dan setengah penganggur adalah mencari pekerjaan. Penjumlahan dari kedua kelompok ini

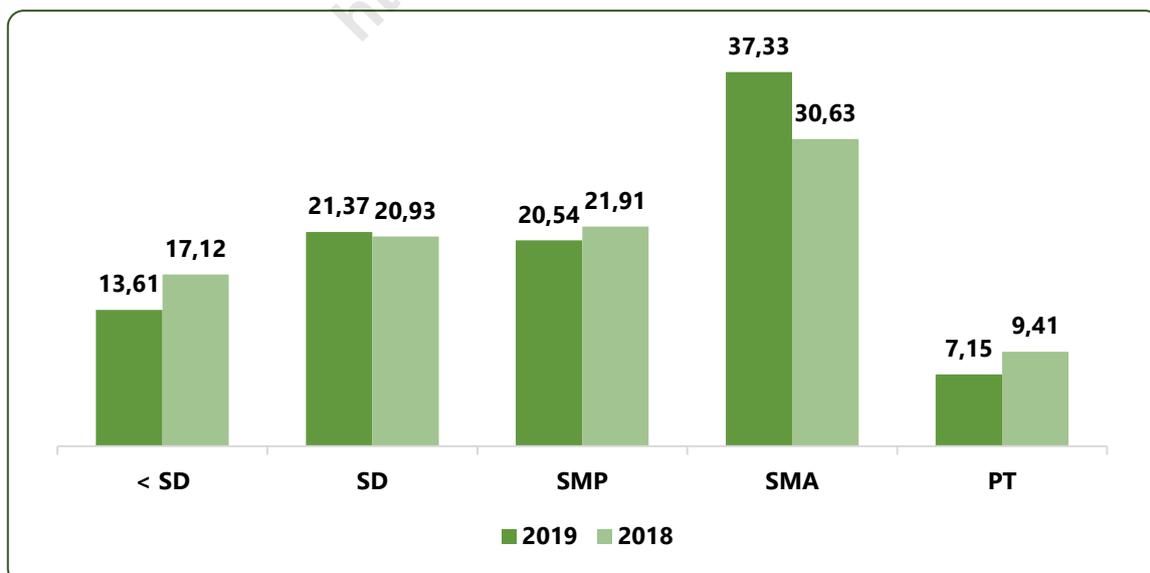
dapat menggambarkan seberapa banyak lapangan kerja yang dibutuhkan di suatu wilayah.

**Gambar 2.16**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka & Tingkat Setengah Pengangguran**  
**di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2018-2019**



Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2018-2019, diolah.

**Gambar 2.17**  
**Proporsi Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (%)**  
**di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2018-2019**



Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2018-2019, diolah.

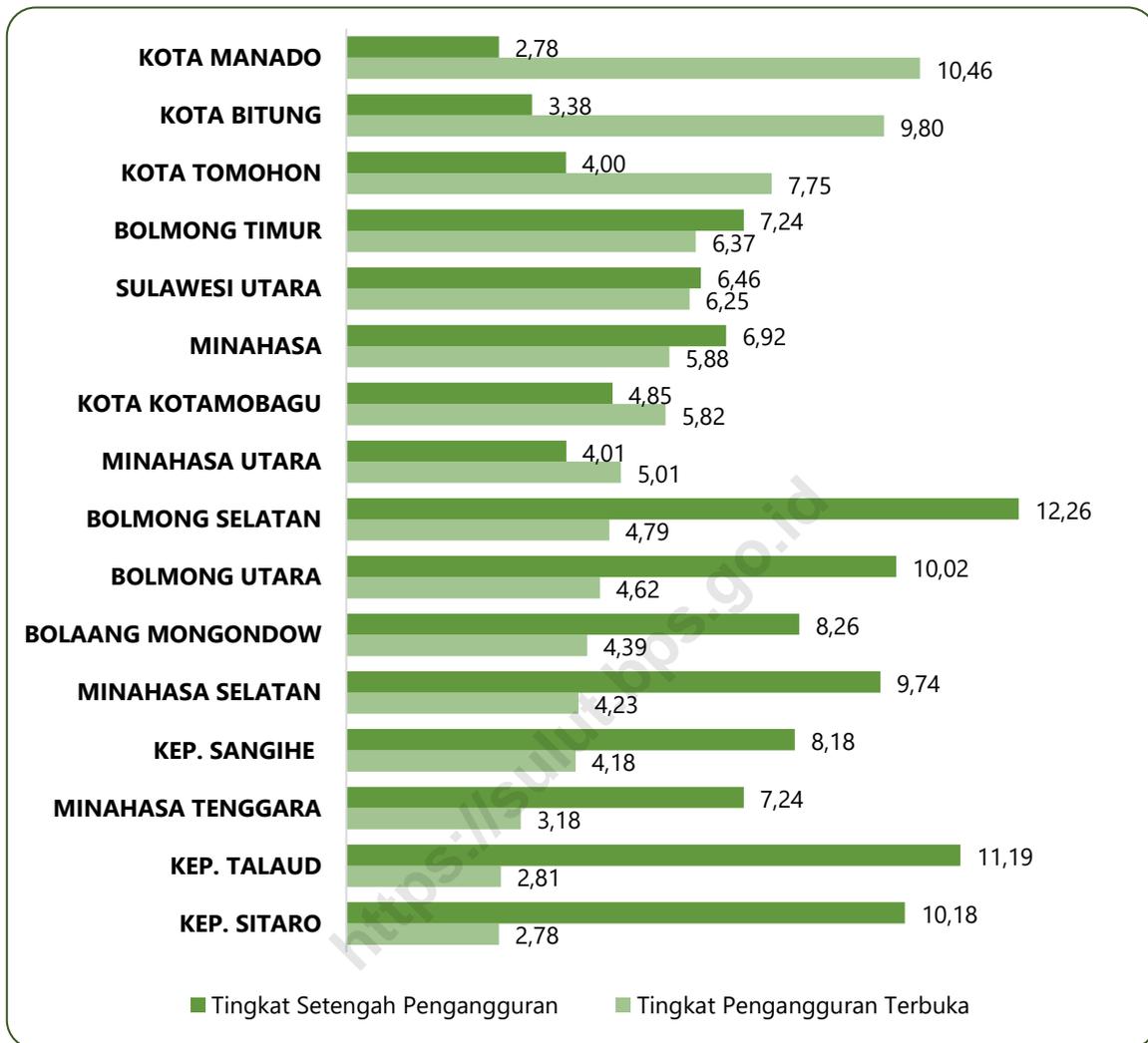
Proporsi setengah penganggur terbesar adalah mereka yang berpendidikan terakhir SMA dengan persentase yang lebih dari 30 persen. Proporsi setengah penganggur berpendidikan SMA meningkat cukup signifikan yakni sebesar 6,7 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Disinyalir bahwa mereka memilih untuk masuk pasar kerja daripada menganggur dan tidak menghasilkan uang. Keterampilan yang relatif rendah menyebabkan mereka hanya mampu terserap pada usaha dengan tingkat upah yang juga rendah sehingga sambil bekerja mereka tetap berusaha mencari pekerjaan agar dapat menambah penghasilan. Dengan demikian, masalah setengah pengangguran ini perlu mendapatkan perhatian karena erat kaitannya dengan pekerja miskin.

Dalam kondisi tertentu dimana tidak ada kebutuhan hidup para pencari kerja maka para pencari kerja tidak mungkin terus bertahan sebagai penganggur sementara mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan mereka terpaksa menerima atau melakukan pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan pendidikan atau skill yang dimiliki. Tentunya hal ini mereka lakukan dengan satu harapan suatu saat kelak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hal inilah yang diduga menjadi faktor penyebab masih tingginya tingkat setengah pengangguran di Sulawesi Utara.

Angka pengangguran terbuka dan setengah menganggur memiliki hubungan terbalik. Dilihat menurut kabupaten/kota, umumnya kabupaten/kota yang memiliki angka pengangguran tinggi, memiliki persentase setengah menganggur yang rendah. Sebaliknya, kabupaten/kota dengan angka pengangguran rendah, setengah penganggurannya tinggi. Misalnya kabupaten Kepulauan Talaud yang memiliki angka pengangguran terendah, persentase penduduk usia kerja yang setengah menganggur sangat tinggi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tingginya persentase setengah menganggur perlu mendapat perhatian, karena meskipun mereka berstatus bekerja, namun mereka masih tetap mencari pekerjaan. Kondisi ini mungkin disebabkan karena mereka masih membutuhkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

**Gambar 2.18**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Setengah Pengangguran Menurut**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2019**



Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019 diolah.

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<http://sulut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jl. 17 Agustus Manado 95119 | Telp (0431) 847044 | email: bps7100@bps.go.id  
Instagram : @bps\_sulut | Facebook : BPS Provinsi Sulawesi Utara | Youtube : BPS Provinsi Sulawesi Utara  
Website : <https://sulut.bps.go.id>

ISBN 978-602-5673-38-2

